

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bali, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, memiliki daya tarik global yang tidak hanya mengundang jutaan wisatawan setiap tahunnya tetapi juga membuatnya rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kepopuleran Bali sebagai tujuan wisata internasional menjadikannya sebagai titik strategis dalam jaringan perdagangan narkoba global. Fenomena ini menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum di wilayah tersebut (Prabawati, 2020:91).

Pada era globalisasi yang kita alami saat ini, kemajuan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Pengaruh teknologi dan informasi membentuk cara berpikir dan budaya masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan bentuk-bentuk kriminal baru. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan narkoba yang tidak lagi mengenal batasan sosial (Prameswar 2024:1). Kasus-kasus terkait narkoba di Bali seringkali melibatkan warga negara asing yang terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan ilegal, mulai dari penyelundupan dan peredaran narkoba hingga penggunaan dan kepemilikan barang terlarang, penyalah guna dan pecandu dilarang secara pidana, tapi penyebab jadi penyalah guna dan pecandu adalah sakit adiksi kecanduan narkoba (Iskandar. 2021:8). Kompleksitas kasus-kasus ini meningkat karena melibatkan berbagai pihak internasional dan seringkali melibatkan teknologi canggih serta metode operasional yang sangat terorganisir. Keberadaan

jaringan-jaringan narkoba internasional yang canggih menambah lapisan kompleksitas dalam penegakan hukum, baik dalam hal investigasi maupun proses peradilan. Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah kasus narkoba yang melibatkan jejak 'kode rahasia' yang dioperasikan oleh jaringan internasional bernama *Hydra*. Jaringan ini dikenal dengan metode operasionalnya yang canggih, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan kode rahasia untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Enkripsi dan kode rahasia ini mempersulit upaya aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan melacak komunikasi serta transaksi narkoba. Teknologi ini memungkinkan anggota jaringan untuk beroperasi secara tersembunyi, membuat mereka sulit ditangkap dan diadili.

Keberadaan jaringan seperti *Hydra* menyoroti tantangan besar dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Bali, serta di Indonesia secara umum. Sistem peradilan harus beradaptasi dengan cepat terhadap metode baru yang digunakan oleh sindikat kriminal. Hal ini mencakup penerapan teknologi forensik yang lebih maju, pelatihan khusus untuk aparat penegak hukum dalam menangani komunikasi terenkripsi, dan penyesuaian kebijakan hukum untuk menghadapi dinamika peredaran narkoba yang semakin kompleks. Lebih jauh, kasus ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih canggih dan terintegrasi dalam menghadapi ancaman kriminal internasional. Penegakan hukum tidak hanya memerlukan peningkatan kapasitas dan teknologi, tetapi juga kerja sama yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum lokal dan internasional. Proses ini mencakup kolaborasi lintas negara

untuk berbagai informasi, teknologi, dan strategi investigasi, serta penegakan hukum yang sesuai dengan standar internasional.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, khususnya di Bali, penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkoba yang melibatkan teknologi tinggi seperti 'kode rahasia' ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan multidimensional. Hal ini melibatkan beberapa aspek penting yang saling berkaitan dan memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai pihak dan lembaga. Selain itu, pendekatan ini harus mengedepankan pemanfaatan teknologi digital dan forensik yang mampu mengatasi teknik-teknik penyamaran yang digunakan oleh jaringan narkoba. Dengan demikian, diperlukan pembaruan kebijakan yang adaptif serta investasi dalam pelatihan aparat penegak hukum untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dalam menghadapi kejahatan narkoba berteknologi tinggi. Secara umum, kesadaran hukum harus terus di tingkatkan pada seseorang agar pengetahuan bahwa segala suatu perilaku tertentu yang dilakukan diatur oleh hukum (Utomo, 2018:14-15).

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk menangani kasus narkoba, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kebijakan ini mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba, dengan tujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkoba terhadap para penyalah guna dan pecandu agar penyalah guna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkoba (Iskandar dkk, 2019:7). Namun, perkembangan teknologi dan metode baru dalam peredaran narkoba menuntut pembaruan dan penyesuaian dalam kebijakan tersebut. Pembaharuan

kebijakan harus mencakup penyesuaian terhadap teknik-teknik penyembunyian canggih yang digunakan oleh jaringan narkoba internasional, seperti penggunaan enkripsi dan komunikasi terenkripsi yang semakin kompleks. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembuatan regulasi yang lebih spesifik untuk menghadapi tantangan teknologi ini, termasuk upaya legislasi yang mendukung pemanfaatan teknologi canggih dalam penegakan hukum (Dewi, dkk 2024).

Penegakan hukum dalam kasus ini memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga-lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, serta otoritas imigrasi berperan penting dalam investigasi dan penangkapan. Dalam menghadapi tantangan ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum narkoba di Indonesia. BNN memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penangkapan, dan pemusnahan narkoba, serta melakukan koordinasi dengan lembaga internasional untuk memerangi perdagangan narkoba lintas negara. Peran BNN sangat penting dalam meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan narkoba melalui kerja sama dengan kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, baik di dalam maupun luar negeri (Parapaga, 2023:2910). Sinergi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan tindakan yang cepat dan efektif. Dalam kasus ini, teknik forensik digital dan pemantauan komunikasi menjadi kunci untuk mengungkap jaringan tersebut. Hal ini termasuk penggunaan perangkat lunak analisis data untuk memecahkan kode rahasia, serta pemantauan jaringan komunikasi untuk melacak aktivitas sindikat. Penegakan hukum juga

memerlukan pelatihan khusus untuk aparat penegak hukum dalam menangani teknologi enkripsi dan penyelidikan digital yang kompleks.

Mengukur efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini melibatkan analisis mendalam terhadap keberhasilan dalam mengidentifikasi, menangkap, dan menghukum pelaku. Ini mencakup penilaian terhadap seberapa efektif proses investigasi dan penuntutan dalam mengatasi jaringan narkoba yang menggunakan teknologi tinggi. Evaluasi ini juga harus mempertimbangkan upaya pencegahan yang dilakukan, seperti kampanye kesadaran publik dan pelatihan untuk aparat penegak hukum (Intifadza, dkk 2024:43-44). Selain itu, penting untuk mengukur dampak dari tindakan penegakan hukum terhadap pengurangan peredaran narkoba di Bali, termasuk perubahan dalam tren kriminal dan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan wisatawan. Analisis ini dapat membantu dalam perencanaan strategi penegakan hukum yang lebih baik dan lebih terarah di masa depan.

Untuk mengatasi tantangan teknologi, perlu ada investasi signifikan dalam alat dan teknologi terbaru, termasuk perangkat untuk dekripsi enkripsi dan sistem pemantauan komunikasi yang canggih. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum harus difokuskan pada keterampilan teknologi mutakhir, serta metode terbaru dalam analisis data digital. Diperlukan penguatan kerja sama internasional melalui perjanjian dan protokol yang lebih jelas mengenai penegakan hukum lintas batas. Hal ini mencakup penyusunan pedoman standar yang dapat diterima bersama mengenai pengumpulan bukti, proses ekstradisi, dan koordinasi investigasi. Memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan Europol juga

sangat penting. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk teknologi dan pelatihan. Pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan efisien untuk memastikan bahwa teknologi dan pelatihan yang diperoleh dapat digunakan secara optimal. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendapatkan teknologi terbaru dan keahlian tambahan dapat menjadi langkah yang strategis (Gabiella, 2019:149).

Kasus jejak ‘kode rahasia’ narkoba jaringan *Hydra* yang melibatkan warga negara asing di Bali menyoroti tantangan besar dalam penegakan hukum pidana di era digital. Empat orang tersangka terkait jaringan narkoba *Hydra* telah ditangkap di Bali, termasuk dua warga negara Ukraina dan satu warga negara Rusia dan juga satu warga negara Indonesia. Penangkapan ini dilakukan pada 2 Mei 2024, di sebuah laboratorium rahasia di Desa Tibubeneng, Kuta Utara, yang memproduksi ganja hidroponik dan mephedrone. Tersangka warga negara Ukraina berperan sebagai pengendali laboratorium, sementara warga negara Rusia bertugas sebagai pengedar dan warga negara Indonesia merupakan buronan kasus pabrik narkoba di Sunter, Jakarta Utara. Para tersangka tersebut menjalankan bisnis gelap narkoba di sebuah vila seluas sekitar 180 meter persegi. Ketiganya menjalankan laboratorium pembuatan mephedrone dan ganja hidroponik di basement vila tersebut. Dari lokasi ini, tim menyita barang bukti diantaranya alat cetak ekstasi, 9,7 kilogram ganja hidroponik, lalu sebanyak 437 gram mephedrone, ratusan kilogram berbagai jenis bahan kimia prekursor pembuatan narkoba jenis mephedrone dan ganja hidroponik, dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan mephedrone dan ganja hidroponik. Diperlukan pendekatan yang holistik dan

terintegrasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif peredaran narkoba. Upaya yang sinergis antara kebijakan, penegakan hukum, dan kerja sama internasional akan memainkan peranan penting dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian mendalam terhadap kasus ini guna mengeksplorasi secara komprehensif tantangan yang dihadapi serta efektivitas strategi penegakan hukum yang ada.

Dalam konteks penegakan hukum di Bali terhadap kasus-kasus narkoba, termasuk yang melibatkan jaringan internasional seperti *Hydra*, perbedaan antara *das Sollen* dan *das Sein* menjadi sangat signifikan. *Das Sollen* merujuk pada harapan dan tujuan yang diinginkan oleh sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, harapan tersebut mencakup penerapan hukum pidana yang efektif terhadap pelaku narkoba, terutama yang melibatkan teknologi tinggi seperti enkripsi. Idealnya, sistem peradilan pidana di Bali seharusnya mampu dengan cepat mengidentifikasi, menangkap, dan mengadili pelaku, serta mencegah penyebaran jaringan narkoba. Hal ini mencakup pembaruan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi canggih oleh aparat penegak hukum, pelatihan khusus untuk menangani kejahatan berteknologi tinggi, serta peningkatan kerja sama internasional yang erat dengan lembaga-lembaga seperti Interpol dan Europol untuk memastikan pengumpulan bukti dan investigasi lintas batas yang efektif. Namun, *das Sein* menggambarkan realitas di lapangan yang sering kali berbeda dari harapan tersebut. Meskipun kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

telah diterapkan, kenyataannya tantangan dalam penegakan hukum sangat kompleks. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam melacak aktivitas jaringan narkoba karena penggunaan teknologi canggih seperti enkripsi dan kode rahasia. Penegakan hukum juga sering kali terbatas oleh kurangnya sumber daya teknologi, keterbatasan pelatihan dalam menangani penyelidikan digital, serta ketidakcukupan kerja sama internasional.

Oleh karena itu, kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* ini menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik penegakan hukum yang ada. Untuk mencapai *das Sollen*, diperlukan pembaruan yang lebih signifikan dalam kebijakan narkoba, peningkatan teknologi forensik, dan pelatihan aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional yang lebih solid. Ini akan membantu mengurangi celah yang ada antara idealitas hukum pidana dan realitas penegakan hukum di lapangan, terutama dalam menghadapi kejahatan narkoba yang semakin canggih di Bali.

Berdasarkan penjelasan tersebut, muncul ketertarikan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai topik ini, sehingga diputuskan untuk mengangkat penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana dalam Penggunaan Teknologi Canggih ‘Kode Rahasia’ pada Peredaran Gelap Narkoba”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi dan teknologi penegakan hukum belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kejahatan yang sangat kompleks.
2. Instrumen hukum dalam penanganan kejahatan narkoba berteknologi tinggi belum dilaksanakan dengan baik.
3. Aparat penegak hukum belum mampu secara maksimal menangani kasus kejahatan narkoba yang berbasis teknologi dengan jaringan yang luas.
4. Kurang efektifnya pemanfaatan kerjasama internasional dalam menghadapi jaringan narkoba internasional.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian, pembatasan masalah memiliki peran penting untuk memastikan penelitian berjalan secara fokus, sistematis, dan tidak keluar dari inti persoalan yang dikaji. Dengan kata lain, pembatasan masalah membantu memusatkan perhatian pada isu utama, sehingga proses pembahasan menjadi lebih jelas dan tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis memberikan pembatasan masalah dan hanya akan mengkaji tentang penegakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana pada peredaran gelap narkoba yang melibatkan teknologi canggih kode rahasia serta tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus peredaran gelap narkoba yang melibatkan teknologi canggih kode rahasia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penggunaan teknologi canggih kode rahasia pada peredaran gelap narkotika?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus peredaran gelap narkotika yang melibatkan teknologi canggih kode rahasia?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain sebagai berikut:

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui dan menambah wawasan di bidang keilmuan hukum khususnya terkait dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada, antara lain:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana dalam penggunaan teknologi canggih kode rahasia pada peredaran gelap narkotika.
- b. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus peredaran gelap narkotika yang melibatkan teknologi canggih kode rahasia.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis serta menjadi referensi tambahan mengenai dinamika dalam bidang hukum dan permasalahan hukum yang muncul, sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca maupun penulis terkait penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penegakan hukum pidana dalam penggunaan teknologi canggih kode rahasia pada peredaran gelap narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus peredaran gelap narkotika yang melibatkan teknologi canggih kode rahasia.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan terkait penegakan hukum pidana dalam penggunaan teknologi canggih kode rahasia pada peredaran gelap narkotika yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi pemahaman lebih mengenai penegakan hukum pidana dalam penggunaan teknologi canggih kode rahasia pada peredaran gelap narkotika yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembelajaran.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan nantinya dapat menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem pengawasan dan penghukumannya untuk mencegah terjadinya kasus peredaran gelap narkoba yang melibatkan teknologi canggih kode rahasia.

